



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

**PROBLEMATIKA GOOD GOVERNANCE
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA)
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

MANDA TASYA
2063201138

**FAKULTAS ILMU ADMNISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
JULI 2024**



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

**PROBLEMATIKA GOOD GOVERNANCE
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA)
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S-) 1 Pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Lancang Kuning

MANDA TASYA

2063201138

**FAKULTAS ILMU ADMNISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
JULI 2024**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Manda Tasya

NIM : 2063201138

Tanda Tangan : 

Tanggal : 04 Juli 2024



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jalan Yos Sudarso KM 8 Rumbai, Telp. (0761) 526558 Pekanbaru

LEMBAR DISETUJUI UNTUK DIPERTAHANKAN

Nama : Manda Tasya

Nim : 2063201128

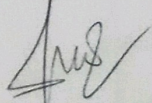
Program Studi : Administrasi Publik

Judul Proposal : Problematika Pembubaran Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN)
Kota Pekanbaru

Pembimbing I


Alexander Yandra S.I.P., M.Si
NIDN. 1008058605

Pembimbing II


Dr. Afni Z., S.I.P., M.Si
NIDN. 1028068502

Mengetahui
Ketua Program Studi Administrasi Publik



Fara Merian Sari, S.Sos., M.Si
NIDN. 1012058804



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jalan Yos Sudarso KM 8 Rumbai, Telp. (0761) 526558 Pekanbaru

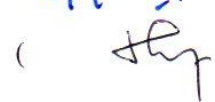
LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini di ajukan oleh :

Nama : Manda Tasya
NIM : 2063201138
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Problematika Good Governance Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)
Kota Pekanbaru

Telah berhasil dipertahankan dihadapan dewan penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Satu (S-1) pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning

DEWAN PENGUJI

Pembimbing	: Alexsander Yandra, S.IP., M.Si	()
Pembimbing	: Dr. Afni Z, S.IP., M.Si	()
Penguji	: Dr. Khuriyatul Husna, S.Sos., MPA	()
Penguji	: Harsini, S.Sos., M.Si	()

Ditetapkan di : Pekanbaru

Tanggal : 09 Juli 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat dan karunia-Nya serta hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Problematika Pembubaran Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) Kota Pekanbaru”** tepat pada waktunya.

Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning. Penulis juga menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini sangat sulit bagi penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Khuriyatul Husna, S.Sos.,MPA selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.
2. Ibu Harsini, S.Sos.,M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.
3. Ibu Dr. .Li. Dra Dian Rianita, MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.
4. Ibu Sri Roserdevi Nasution, S.Sos.,M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.
5. Ibu Fara Merian Sari, S.Sos.,M.Si selaku Ketus Prodi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.
6. Bapak Sudaryanto, S.P., M.Si selaku Sekretaris Prodi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.
7. Bapak Alexsandar Yandra, S.IP.,M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan dukungan, semangat serta waktu, tenaga dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Afni Z.,S.IP.,M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan dukungan, semangat serta waktu, tenaga dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
9. Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru yang telah memberikan waktu serta data-data yang berguna bagi penulisan skripsi ini sehingga dapat mendukung hingga penyelesaiandalam penulisan ini.
10. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang telah memberikan waktu serta data-data yang berguna bagi penulisan skripsi ini sehingga dapat mendukung hingga penyelesaiandalam penulisan ini.

11. DPRD Kota Pekanbaru yang telah memberikan waktu serta data-data yang berguna bagi penulisan skripsi ini sehingga dapat mendukung hingga penyelesaian dalam penulisan ini.
12. Teristimewa untuk kedua orangtua dan saudara penulis yang sangat luar biasa, Bapak Lukman dan Ibu Ida Laila dan adik Hikmawati Mandalin yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, dan dukungan moril maupun materi tanpa henti bagi penulis serta menguatkan penulis dalam doa-doanya. Orangtua yang sangat luar biasa dan sosok yang penulis harus banggakan dan bahagiakan.
13. Terimakasih kepada Bolas Arif Alberto, Syaripah Hamida, Vinesa Margaretha Siregar, Wesdi Afriadi Silaban, Muhammad Teguh Kurnia Putra. Terimakasih sudah menjadi teman yang selalu bersedia mendengarkan keluh kesah penulis selama menempuh perkuliahan dan mengajarkan banyak hal. Pengalaman yang luar biasa bertemu orang hebat seperti kalian. Kalian menjadi moment yang tidak terlupakan dan sangat dirindukan. Semoga persahabatan kita akan terus berlanjut sampai kapanpun.
14. Diri saya sendiri, yang telah mampu bertahan untuk berada sampai pada titik ini dengan melewati berbagai macam hambatan dalam mengerjakan tugas akhir ini. Terimakasih karena selalu berusaha untuk berpikir positif ketika keadaan sempat tidak berpihak. Terimakasih sudah mampu melewati dan selalu berusaha mempercayai diri sendiri, hingga akhirnya diri saya mampu membuktikan bahwa saya bisa mengandalkan diri saya sendiri.

Pekanbaru, 09 Juli 2024

Penulis

Manda Tasya

ABSTRAK

Nama : Manda Tasya

Program Studi : Administrasi Publik

Judul : Problematika Good Governance Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru.

Penelitian ini membahas tentang Problematika Pembubaran Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) Kota Pekanbaru yang mana saat ini kasus HIV/AIDS di Pekanbaru cenderung Flate yang cenderung tidak menurun. Teori yang digunakan ialah teori Good Governance Oleh Sudarmiyanti. Adapun informan dalam penelitian ini adalah stakeholder-stakeholder yang terlibat dalam KPA Kota Pekanbaru Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dan jenis penelitian yang digunakan adalah memakai pendekatan Deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa tidak adanya Sistem Organisasi Tata Kerja, Kesesuaian Dengan Renstra, Kurangnya ketersediaan Anggaran dan Aturan Hukum yang tidak relevan lagi, dengan adanya temuan permasalahan tersebut maka perlunya memaksimalkan keterlibatan stakeholder dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru tentu adalah dengan jalan mengubah aturan Perwako menjadi Peraturan daerah dalam usaha pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyajikan tinjauan sistematis KPA ditingkat provinsi dan kabupaten/kota diseluruh Indonesia dalam mencegah HIV/AIDS.

Kata Kunci :

Keterlibatan stakeholder, Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS, KPA Kota Pekanbaru.

ABSTRACT

Name : Manda Tasya

Study Program : Public administrasion

Title : Problems with the Good Governance of the Pekanbaru City AIDS Commission (KPA).

This research discusses the Problrmatics of the Dissolution of the Pekanbaru City National AIDS Management Commission (KPAN), where currently HIV/AIDS cases in Pekanbaru tend to be flat and do not tend to decrease. The theory used is the Good Governance theory by Sudarmiyanti. The informants in this research are stakeholders involved in the Pekanbaru City KPA. The data used is primary data and secondary data and the type of research used is a qualitative descriptive approach. The results of the research found that there is no organizational system for work procedures, compatibility with strategic plans, lack of budget availability and legal regulations that are no longer relevant. With the findings of these problems, the need to maximize the involvement of stekhoder in preventing and controlling HIV/AIDS in Pekanbaru City is of course by changing Pewako regulations into regional regulations in efforts to prevent and control HIV/AIDS in Pekanbaru City. The aim of this research is to present a systematic review of KPA at the provincial and district/city levels throughout Indonesia in preventing HIV/AIDS.

Keywords : Stakeholder involvement, Prevention and Management of HIDS/AIDS, Pekanbaru City KPA.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
2.1 Konsep Teoritis	12
2.1.1 Administrasi.....	12
2.1.2 Organisasi.....	15
2.1.3 Manajemen	16
2.1.4 Problematika.....	16
2.1.5 Governance.....	17
2.1.6 Good Governance	18
2.2 Penelitian Terdahulu	21
2.3 Fokus Penelitian	25
2.4 Kerangka Pemikiran	30
BAB III METODE PENELITIAN	31

3.1 Lokasi Penelitian	31
3.2 Metode Penelitian.....	31
3.3 Narasumber/Informan.....	32
3.4 Jenis Dan Sumber Data.....	33
3.4.1 Data Primer	33
3.4.2 Data Sekunder	34
3.5 Teknik pengumpulan data.....	34
3.6 Analisis data	35
3.7 Keabsahan data.....	36
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	37
4.1 Sejarah Kota Pekanbaru	37
4.2 Visi dan Misi Kota Pekanbaru.....	38
4.2.1 Visi.....	39
4.2.2 Misi	39
4.3 Keadaan Geografis Kota Pekanbaru	40
4.3.1 Letak Dan Luas.....	40
4.3.2 Batas- batas Wilayah Kota Pekanbaru	40
4.3.3 Iklim Di Kota Pekanbaru	40
4.4 Sejarah Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru	41
4.5.1 Visi.....	43
4.5.2 Misi	43
4.6.1 Berdasarkan Tugas dan Wewenang.....	44
4.7 Struktur Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru	47

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	49
5.2 Temuan Preferensi Keterlibatan Stakholder Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru	50
5.2.1 Tidak Adanya Sistem Organisasi Tata Kerja Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru	54
5.2.2 Ketersediaan Anggaran.....	57
5.2.3 Kesesuaian Dengan Rencana dan Strategi	58
5.3 Pembahasan Analisis Problematika Pembubaran Komisi Penanggulangan AIDS Nasional Kota Pekanbaru	59
5.3.1 Akuntabilitas	59
5.3.2 Transparansi	60
5.3.3 Partisipasi	62
5.3.4 Supermasi hukum	63
5.4 Problematika Preferensi Keterlibatan Stakholder dalam Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Kota Pekanbaru	65
5.5 Faktor-faktor Penghambat Preferensi Keterlibatan Stakholder dalam Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Kota Pekanbaru.	66
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
6.1. Kesimpulan	68
6.2 Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data pelaporan stakeholder komisi penanggulangan Aids Kota pekanbaru setiap tahun	4
Tabel 1. 2 Data stakeholder yang mengetahui dan tidak mengetahui instansi mereka tergabung dalam kepengurusan KPA kota pekanbaru.....	6
Tabel 2. 1 Penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik HIV/AIDS	22
Tabel 3. 1 daftar wawancara dengan informan komisi penanggulangan Aids.....	33
Tabel 4.1 Tugas dan wewenang kpa kota pekanbaru berdasarkan perwako no 32 tahun 2013 tentang pencegahan dan penanggulangan aids kota pekanbaru	44
Table 5.1 Data Pasien HIV/AIDS Dari Tahun 2019-2023	49
Tabel 5. 2 Data stekholder-stekholder terlibat yang penulis temui dilapangan dengan Teknik Penelitian <i>stratified sampling</i>	51
Tabel 5. 1 Stahekolder Yang Melakukan Pelaporan Dari Tahun 2020-2024 Pada Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru	55
Tabel 5. 2 Jumlah Anggaran Periode Ketiga Tahun 2022-2027 Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) merupakan lembaga negara nonstruktural yang independen. Bertujuan untuk meningkatkan pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia. Dimana lembaga ini dibentuk oleh departemen kesehatan Indonesia berdasarkan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1994 sebagai KPA. Pada tahun 2006 KPA diubah menjadi KPAN dan dalam peraturan tersebut untuk kelancaran pelaksanaan tugas KPAN maka dibentuklah KPA ditingkat provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia dalam mencegah perkembangan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan merupakan singkatan dari *Acquire Immunodeficiency Syndrome* (Yandra, A., Husna, K., Arizal, 2021).

Human Immunodeficiency Virus (HIV) menyerang sistem kekebalan tubuh manusia kemudian menimbulkan *Acquire Immunodeficiency Syndrome* (AIDS) merupakan suatu kondisi medis berupa kumpulan tanda atau gejala yang mengakibatkan turun dan hilangnya kekebalan tubuh seseorang, sering berwujud infeksi yang bersifat ikutan (oportunistik) dan belum ada obat atau vaksin yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut. HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang penyebarannya melalui hubungan seks bebas, jarum sunti, transfusi darah dan kontak lain dengan cairan tubuh yang terinfeksi (Prihati, P., Arizal, A., & Yandra, A., 2021).

Menurut World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa penyebaran virus HIV/AIDS merupakan wabah global paling mematikan yang telah merenggut lebih dari 40 juta jiwa diseluruh dunia. Sedangkan di Indonesia sudah lebih dari 770 orang yang meninggal akibat penyakit tersebut. Berdasarkan hal tersebut penyebaran HIV/AIDS masih menjadi masalah yang sangat serius untuk dapat dicegan dan ditanggulangi secara efektif dan efisien. Mengingat, penyebaran virus ini bersifat dinamis, sulit diprediksi penyebarannya dan bersifat ekstrim yang mudah berpindah secara geografis dan sosial tidak tetap (fluktuatif) keseluruh wilayah dan daerah-daerah di Indonesia termasuk di Kota Pekanbaru (Andrianto, 2020).

Kota Pekanbaru termasuk menjadi daerah penyebaran HIV/AIDS. Maka, dalam mencegah dan melakukan penanggulangan HIV/AIDS pada tahun 2013 pemerintah Kota Pekanbaru membentuk komisi penanggulangan AIDS yang diatur dalam peraturan walikota nomor 32 tahun 2013 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru yang bertugas memimpin, mengelola, dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan penanggulangan HIV/AIDS dengan melibatkan stekholder-stekholder yang berasal dari lembaga pemerintah dan non pemerintahan. Selang 4 tahun berdirinya KPA kota Pekanbaru, pada 31 Desember 2017 komisi penanggulangan AIDS nasional dibubarkan oleh presiden Republik Indonesia, pembubaran dilakukan karena pemerintah melakukan revisi atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 Tentang

Komisi Penanggulangan AIDS Nasional menjadi Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 dalam Peraturan Presiden ini Ketentuan pasal 17 diganti dengan pasal 17 A yang berbunyi "*Komisi Penanggulangan AIDS Nasional Menyelesaikan Masa Tugasnya Paling Lambat Tanggal 31 Desember Tahun 2017*" (Kelibay, 2023). Dengan berakhirnya masa tugas KPAN dalam urusan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian HIV dan AIDS menjadi tanggung jawab Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenduk-PR) dan aset KPAN menjadi milik negara dan diserahkan ke kementerian yang menyelenggarakan urusan Kesehatan (Kementerian Kesehatan RI) sejak diberlakukannya aturan tersebut dan dikutip dari detiknews yang tayang pada 30 Maret 2019 Jokowi menyampaikan ada 23 lembaga yang dibubarkan termasuk KPAN hal tersebut dilakukan dengan alasan adalah untuk membangun pelayanan public yang tidak berbelit-belit dan dilakukannya penyederhanaan dan penajaman kelembagaan dan berlanjut pada tahun 2020 dikutip CNBC Indonesia Jokowi menyampaikan bubarkan Lembaga negara bisa hemat ratusan miliar, dari dua berita diatas dapat kita pahami pembubaran KPAN dilakukan adalah untuk menyederhanakan pelayanan yang berbelit-belit dan untuk menghemat anggaran keuangan negara. Sehingga pembubaran yang dilakukan bukan hanya pada KPAN saja tapi banyak Lembaga-lembaga lain yang dibubarkan dengan permasalahan yang sama.

Setelah dibubarkannya KPAN implikasi pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di kota Pekanbaru menimbulkan masalah baru dalam implikasi pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di kota Pekanbaru, baik dari menjalankan fungsi koordinasi, perencanaan strategi, penganggaran, dan program lainnya menjadi terkendala yang berdampak makin tidak terkontrolnya laju perkembangan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru. Dimana salah satu dampak dibubarkannya KPAN adalah bahwa stekholder yang terhimpun dalam kepengurusan KPA Kota Pekanbaru tidak memiliki arah dan fungsi yang jelas, dimana tidak semua stekholder tidak memberikan pelaporan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang juga ditambah dengan tidak dilakukannya perubahan-perubahan terhadap kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru. Berikut data stekholder – stekholder yang memberikan pelaporan kepada sekretariat KPA Kota Pekanbaru dari tahun ketahun :

Tabel 1. 3 Data Pelaporan Stakeholder Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru Setiap Tahun.

Periode 2013-2017						
No	Instansi	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Dinas kesehatan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Lapas kelas II A	Ada	Ada	Tidak	Tidak	Tidak
3	Lapas kelas II B	Ada	Ada	Tidak	Tidak	Tidak
4	Dinas sosial	Ada	Ada	Tidak	Tidak	Tidak
5	BNN	Ada	Ada	Tidak	Tidak	Tidak
6	Dinas Ketenagakerjaan	Ada	Ada	Tidak	Tidak	Tidak
7	12 lainnya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Periode 2017-2022						
No	Instansi	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Dinas kesehatan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	25 lainnya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Periode 2023-2027						
No	Instansi	Tahun				
		2023	2024	2025	2027	2028
1	Dinas Kesehatan	Ada	*	*	*	*
2	25 lainnya	Tidak	*	*	*	*

Sumber: Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru (2024)

KPA kota Pekanbaru sudah tiga kali periodeisasi pembentukan yaitu pada periode 2013-2017, 2017 – 2022 dan 2023-2028 pelaporan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS hanya awal-awal pembentukan di periode pertama dan tahun pertama saja yaitu 2014 dan hanya 6 stakeholder saja yang melakukan pelaporan diantaranya dinas Kesehatan, Lapas Kelas II A, Lapas Kelas II B, Dinas Sosial, BNN dan Dinas Tenaga Kerja di Kota Pekanbaru dan tahun berikutnya hanya dinas kesehatan saja yang melakukan pelaporan kepada Sekretariat KPA Pekanbaru.

Melihat permasalahan ini KPA Kota Pekanbaru tidak karena tidak dilakukannya perubahan terhadap kebijakan penanggulangan HIV/AIDS kota Pekanbaru dan tentu hal ini berdampak juga terhadap Sistem Organisasi Tata Kerjanya dimana para setiap stakeholder tidak berkoordinasi dengan baik dan tidak menganggap dan paham bahwa pencegahan dan penangulangan HIV/AIDS Di Kota Pekanbaru bukan bagian tanggung jawab, tugas, pokok dan fungsi mereka dengan terjadinya hal ini bisa kita simpulkan bahwa tidak adanya fungsi pengawasan oleh pihak tertentu terhadap KPA Kota Pekanbaru dari organisasi ini terbentuk hingga sekarang berdasarkan hasil wawancara dengan stakeholder-stakeholder yang terlibat banyak tidak mengetahui bahwa instansi mereka tergabung dalam KPA Kota Pekanbaru dan ditambah lagi dengan tidak inklusinya Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2013 dengan peraturan diatasnya seperti Peraturan daerah Provinsi ataupun peraturan pemerintah,

sehingga Perwako tersebut tidak memiliki ketegasan bahwa setiap stakeholder yang terlibat seharusnya memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan usaha Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru.

Berikut data stekholder-stekholder yang mengetahui bahwa instansi mereka ikut tergabung dalam KPA Kota Pekanbaru :

Tabel 1. 4 Data Stakeholder yang mengetahui dan Tidak Mengetahui Instansi Mereka Tergabung Dalam Kepengurusan KPA Kota Pekanbaru

No.	Stekholder	Keterangan	
		Mengetahui	Tidak Mengetahui
1.	Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru	✓	
2.	Kapolresta Kota Pekanbaru	-	
3.	Dandim Kota Pekanbaru	-	
4.	Tim Penggerak PPK	-	
5.	Bappeda Kota Pekanbaru	-	
6.	Kementrian Agama Kota Pekanbaru	-	
7.	BNN Kota Pekanbaru	-	
8.	Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru	-	
9.	Dispora Kota Pekanbaru	-	
10.	Dinas Sosial Kota Pekanbaru	-	
11.	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Pekanbaru	-	
12.	Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru	-	
13.	Kesbangpol Kota Pekanbaru	-	
14.	Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	-	
15.	DPPKB Kota Pekanbaru	-	
16.	Satpol PP Kota Pekanbaru	-	
17.	PMI Kota Pekanbaru	-	
18.	Pelabuhan Kelas II Kota Pekanbaru	-	
19.	Lapas Kelas II A Kota Pekanbaru	-	
20.	Lapas Kelas II B Kota Pekanbaru	-	
21.	Kepala Rutan Kelas I Kota Pekanbaru	-	
22.	IDI Kota Pekanbaru	-	
23.	IPDI Kota Pekanbaru	-	
24.	IBIKota Pekanbaru	-	
25.	PPNI Kota Pekanbaru	-	
26.	FMPA Kota Pekanbaru	-	

Sumber :SK Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru Tahun 2022-2027

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa ada dua puluh enam stekholder yang terlibat pada KPA Kota Pekanbaru, namun dalam perwako nomor 32 tahun 2013 belum memuat secara jelas tugas dan wewenang stekholder yang tergabung dalam pengurusan dan penanggulangan HIV/AIDS.

Perwako tidak menginklusi peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2007 tentang pedoman umum pembentukan komisi penanggulangan AIDS dan masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS di daerah. Didalam permendagri pembentukan komisi penanggulangan AIDS di daerah terdapat usaha pencegahan dan penanggulangan AIDS menjadi tugas, pokok dan fungsi dari oerorganisasi perangkat daerah terkait yang lebih jelasnya diatur dalam bab PENDANAAN pasal 13 ayat 2 yang berbunyi : Belanja program dan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / Organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dengan penangulangan HIV/AIDS, sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Dengan tidak adanya inklusi perwako no 32 tahun 2013 tentang pencegahan dan penaggulangan AIDS dengan amanat aturan yang lebih tinggi yaitu menteri dalam negeri no 20 tahun 2007 tentang pedoman umum pembentukan komisi penanggulangan AIDS dan masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS di daerah provinsi Riau no 4 tahn 2004 sehingga hal ini pastinya menimbulkan ketidakjelasan hukum dan pedoman bagi stekholder yang terlibat dalam komisi penanggulangan

AIDS kota pekanbaru, sehingga menimbulkan fenomena gejala berupa belum semua anggota komisi penanggulangan AIDS kota Pekanbaru terlibat maupun melakukan aksi –aksi dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS kota Pekanbaru.

Berdasarkan survei dan studi kepustakaan yang peneliti lakukan, maka peneliti mendapatkan beberapa fenomena gejala antara lain:

1. Tidak semua stakeholder yang konsisten dalam melakukan pelaporan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dapat dilihat pada table 1.1.
2. Hampir secara keseluruhan stakeholder yang terlibat tidak tahu bahwa institusi mereka bergabung dalam kepengurusan KPA Kota Pekanbaru dapat dilihat pada table 1.2.

Berdasarkan fenomena dan gejala diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Problematika Pembubaran Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) Dalam Kota Pekanbaru”**.

1.2 Perumusan Masalah

Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) merupakan lembaga negara nonstruktural yang independen adalah bertujuan untuk meningkatkan pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan HIV/AIDS. Namun pada tahun 2017, KPAN dihabiskan masa tugasnya oleh presiden Republik Indonesia. Dengan tidak adanya inklusi perwako no 32 tahun 2013 tentang pencegahan dan penanggulangan AIDS dengan amanat aturan

yang lebih tinggi yaitu menteri dalam negeri no 20 tahun 2007 tentang pedoman umum pembentukan komisi penanggulangan AIDS dan masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS di daerah provinsi Riau no 4 tahun 2004 sehingga hal ini pastinya menimbulkan ketidakjelasan hukum dan pedoman bagi stakeholder yang terlibat dalam komisi penanggulangan AIDS kota Pekanbaru, sehingga menimbulkan fenomena gejala berupa belum semua anggota komisi penanggulangan AIDS kota Pekanbaru terlibat maupun melakukan aksi –aksi dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS kota Pekanbaru.

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan di lapangan dan studi kepustakaan penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika Good Governance Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) kota Pekanbaru ?
2. Bagaimana tingkat penyebaran HIV/AIDS pasca dibubarkannya KPAN kota Pekanbaru ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan tidak adanya inklusi perwako no 32 tahun 2013 tentang pencegahan dan penanggulangan AIDS dengan amanat aturan yang lebih tinggi yaitu menteri dalam negeri no 20 tahun 2007 tentang pedoman umum pembentukan komisi penanggulangan AIDS dan masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS di daerah provinsi Riau no 4 tahun 2004 sehingga hal ini pastinya menimbulkan ketidakjelasan hukum dan pedoman bagi stakeholder yang terlibat dalam komisi penanggulangan AIDS kota Pekanbaru.

pekanbaru, sehingga menimbulkan fenomena gejala berupa belum semua anggota komisi penanggulangan AIDS kota Pekanbaru terlibat maupun melakukan aksi-aksi dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS kota Pekanbaru.

Memperhatikan rumusan masalah diatas, maka ditetapkan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui problematika good governance komisi penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui tingkat penyebaran HIV/AIDS paska dibubarkannya KPAN Kota Pekanbaru.

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua yaitu secara teoritis dan praktis:

Secara teoritis :

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk penulis atau peneliti selanjutnya yang memiliki persamaan judul, khususnya untuk peneliti satu almamater yakni Universitas Lancang Kuning.
2. Untuk sarana informasi bagi pembaca yang membutuhkan informasi.
3. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan pembaca mengenai masalah yang diteliti.

Secara praktis :

1. Bagi akademis, hasil penelitian dapat menambah wawasan atau dapat digunakan sebagai literatur untuk memperdalam ilmu.
2. Bagi organisasi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi organisasi terkait untuk pengembangan manajemen organisasi dan dijadikan bahan acuan bagi organisasi dalam menganalisis dan mengambil keputusan untuk kebijakan yang akan diambil.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

KPAN berfungsi sebagai lembaga pemerintah independen yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan upaya pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS di seluruh Indonesia. Pada tahun 2017, KPAN dibubarkan dan tugasnya diambil alih oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Setelah pembubaran KPAN, terjadi ketidakjelasan peran dan fungsi di antara para pemangku kepentingan yang terlibat dalam manajemen Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru

Banyak pemangku kepentingan tidak menyadari bahwa institusi mereka tergabung dalam KPA Kota Pekanbaru. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian dalam sistem kerja organisasi, ketersediaan anggaran, dan konsistensi kolaborasi antar pemangku kepentingan. Pergantian pimpinan yang sering terjadi tanpa transfer informasi yang memadai memperburuk situasi ini.

KPAN telah memainkan peran penting dalam mengembangkan dan mengoordinasikan layanan publik terkait pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS. Namun, setelah pembubarannya, terjadi penurunan efektivitas koordinasi dan implementasi program di tingkat daerah, khususnya di Kota Pekanbaru. Ini menunjukkan pentingnya peran KPAN dalam

mengoordinasikan berbagai upaya dan perlunya mekanisme pengganti yang efektif untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan KPAN.

6.2 Saran

- a. Sudah saatnya aturan Hukum Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dalam bentuk Peraturan Daerah. hal ini bertujuan pentingnya keterlibatan Lembaga Legislatif (DPRD) Kota Pekanbaru dalam membentuk aturan Hukum secara jelas dan terperinci, tersistemnya pengawasan secara langsung dari Lembaga Legislatif (DPRD) Kota Pekanbaru, dan Tersedianya penetapan *Ploting* anggaran Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS Kota Pekanbaru, demi terciptanya Sistem Pencegahan dan Penanggulangan AIDS yang baik, jelas, efektif dan efisien, sehingga menjadi dasar dan pedoman yang utuh dalam Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru kedepannya.
- b. Seluruh Stakeholder-stakeholder yang terlibat diharapkan harus memasukan program Pencegahan dan Penanggulangan dalam Rencana Strategi Instansinya. Peraturan Walikota Pekanbaru tidak boleh langsung ditetapkan sepihak dengan Keputusan Walikota.
- c. Diharapkan kepada seluruh Stakeholder untuk berkoordinasi dan melakukan pelaporan kepada Sekretariat Komisi Penanggulangan HIV/AIDS.

Diharapkan Kepada Stakeholder - stakeholder yang terlibat menentukan siapa implementator dan bidang yang bertugas mengurus Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS Kota Pekanbaru.

- d. Penelitian ini merekomendasikan agar ada upaya peningkatan koordinasi dan komunikasi di antara pemangku kepentingan, serta peningkatan anggaran dan sumber daya untuk program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tingkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, G. S., Muhaimin, T., Lita, L., Nurlisis, N., Riva'i, S. B., & Fahmi, M. M. (2019). Perilaku Berisiko HIV/AIDS Pada Remaja Sma Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Harapan Raya Pekanbaru Tahun 2018. *Photon: Jurnal Sain dan Kesehatan*, 9(2), 246-257.
- Andrianto, M. B., Setyawati, A. D., Muin, M., & Mendrofa, F. A. M. (2020). Koping Religius pada Kelompok Penderita HIV/AIDS. *Journal of Telenursing (JOTING)*, 2(2), 150-157.
- Dewi, Y. I., & Safitri, A. (2017). Pencegahan HIV/AIDS Oleh Perempuan Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ners Indonesia*, 8(1), 15-22.
- Maharani, R. (2014). Stigma dan diskriminasi orang dengan HIV/AIDS (ODHA) pada pelayanan kesehatan di Kota Pekanbaru tahun 2014. *Jurnal kesehatan komunitas (Journal of community health)*, 2(5), 225-232.
- Marlina, M., Suyanto, S., & Masadi, N. (2010). Perilaku Pekerja Seks Komersial Dalam Penggunaan Kondom Untuk Pencegahan Transmisi HIV/AIDS Di Lokalisasi Teleju Kota Pekanbaru. *Jurnal kesehatan komunitas (Journal of community health)*, 1(1), 20-31.
- Martilova, D. (2020). Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan Remaja Dalam Pencegahan Hiv AIDS Di Sma N 7 Kota Pekanbaru Tahun 2018. *JOMIS (Journal of Midwifery Science)*, 4(1), 63-68.
- Kelibay, I., Kadir, M. A. A., Ula, S. N. N., Basri, L., & Rosnani, R. (2023). Koordinasi Komisi Penanggulangan AIDS dalam Upaya Pencegahan

- Penularan HIV/AIDS di Kota Sorong. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 8(2), 334-344.
- Prihati, P., Arizal, A., & Yandra, A. (2021). The Mayor's Political Leadership in HIV/AIDS Prevention and Control in Pekanbaru City. *JOELS: Journal of Election and Leadership*, 2(1), 1-6.
- Rasyid, Z., Candra, L., & Saputra, K. (2019). Perilaku PSK Terhadap Penggunaan Kondom Dalam Upaya Pencegahan HIV/AIDS Di Perum Jondul Lama Kota Pekanbaru Tahun 2017. *Collaborative Medical Journal (CMJ)*, 2(1), 8-19.
- Sari, G. G., Wirman, W., & Simarmata, M. (2020). Presentasi Diri Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di Kota Pekanbaru-Riau. *Warta Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 3(01), 45-53.
- Trijupitasari, R., & Riauan, M. A. I. (2017). Pola Komunikasi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru Dalam Mensosialisasikan Bahaya HIV dan AIDS Kepada Penjaja Sex dan Gay. *Medium*, 6(1), 78-86.
- Wirman, W., & Sinaga, P. A. (2015). *Pembentukan konsep diri orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di kota Pekanbaru dalam perspektif fenomenologi* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Yandra, A., Husna, K., Arizal, A., Andrizal, A., & Nursafira, M. S. (2021). The Consistency of Stakeholder Involvement in Prevention and Control of HIV/AIDS. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 37(2), 485-495.